



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III - 2025

LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA	2
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1. LATAR BELAKANG	7
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	9
1.4. ISU STRATEGIS	9
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	12
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
2.3. PERJANJIAN KINERJA	13
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	14
2.5. METODE PENGUKURAN	14
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	39
3.3. REALISASI ANGGARAN	45
3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	55
BAB IV	56
PENUTUP	56
4.1. KESIMPULAN	56
4.2. SARAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kategori Capaian Indikator Kinerja	14
Tabel 1. 2 Predikat Nilai Kinerja Organisasi	15
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III	17
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan target triwulan	18
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya	18
Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU I.....	18
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III IKU 2 dengan Target Bersangkutan	19
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 dengan Triwulan Sebelumnya	19
Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 2.....	20
Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi dengan target triwulan bersangkutan	21
Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya	21
Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 4.....	22
Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan bersangkutan	23
Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan triwulan sebelumnya	23
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi TW III dengan Capaian Tahunan IKU 5	23
Tabel 3. 14 Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dan target triwulan III	24
Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya	25
Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 6.....	25
Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan III	26
Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan triwulan sebelumnya.....	26
Tabel 3. 19 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 7.....	26
Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 8.....	27
Tabel 3. 21 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 9.....	28
Tabel 3. 22 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 10.....	29
Tabel 3. 23 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 11.....	30
Tabel 3. 24 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 12.....	30
Tabel 3. 25 Perbandingan realisasi triwulan III dengan target tahunan IKU 13	31
Tabel 3. 26 Perbandingan realisasi triwulan III dengan target tahunan IKU 14	32
Tabel 3. 27 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 15.....	33
Tabel 3. 28 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 16.....	34
Tabel 3. 29 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 17.....	35
Tabel 3. 30 Perbandingan realisasi triwulan II dengan target tahunan IKU 18	36
Tabel 3. 31 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 23.....	38
Tabel 3. 32 Perbandingan capaian kinerja TW III indikator Label produk tembakau	38
Tabel 3. 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II	41
Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Hasil Evaluasi TW III	44
Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan III 2025.....	47
Tabel 3. 36 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	48
Tabel 3. 37 Range Tingkat Efisiensi	49
Tabel 3. 38 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Merauke	8
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke.....	9
Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	45

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat pada periode triwulan III tahun anggaran 2025.

Penyusunan laporan kinerja interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja pada periode triwulan III tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Loka POM di Kabupaten Merauke telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di Papua Selatan dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim periode triwulan III Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan pada periode triwulan berikutnya dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kerja Papua Selatan.

Merauke, 20 Oktober 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke,

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Indonesian Food and Drug Administration) for the Kabupaten Merauke (Merauke Regency). The stamp contains the text "LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" around the top edge, "BADAN POM" in the center, and "DI KABUPATEN MERAUKE" around the bottom edge. A blue stylized logo is also present. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Minarto, S.Farm., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Merauke Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis selama triwulan II. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Merauke menyajikan hasil pengukuran terhadap 7 sasaran kegiatan dengan 26 indikator kinerja. Untuk periode triwulan II, nilai kinerja organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Merauke 100,15% dengan predikat istimewa.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan selama periode triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja sebesar 105,94%.
2. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah masing-masing UPT dengan capaian kinerja sebesar 121,67%.
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian kinerja 140%.
4. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja 27,27%.
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan capaian kinerja 50%.
6. Layanan publik UPT yang prima belum dapat dilakukan penilaian karena nilai capaian kinerja akan dihitung di triwulan IV.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal belum dapat dilakukan penilaian karena nilai capaian kinerja pada 3 indikator yang mendukung sasaran strategis tersebut dihitung secara tahunan pada akhir tahun.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke didukung dengan anggaran awal sebesar Rp3.927.558.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN Tahun 2025. Sesuai dengan surat Sekretaris Utama No. KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025, dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN TA 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp30.437.000,- sehingga pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke meningkat menjadi Rp3.957.995.000,-. Namun, dari besaran pagu tersebut sebesar Rp1.320.426.000,- (33,36%) tidak dapat digunakan karena termasuk ke dalam anggaran yang diblokir secara mandiri dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Sampai dengan tanggal 30 September 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.898.455.795,- atau 47,96% dari total pagu anggaran tahun 2025.

HIGHLIGHT KINERJA



Loka POM Merauke bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan dilaksanakan pada tanggal 16-20 Juli 2025.



Dalam rangka percepatan pengembangan dunia usaha dan keberpihakan terhadap UMKM, Loka POM di Kabupaten Merauke melakukan kegiatan pendampingan pengurusan izin edar BPOM di UMKM Menara Kota Indonesia pada tanggal 16 Juli 2025. Loka POM di Kabupaten Merauke senantiasa berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM dengan pendampingan penerbitan sertifikat.

Sangat diperlukan peningkatan kerja sama dari berbagai pihak dan sektor dalam pemberdayaan dan penguatan UMKM agar lebih maju dan berkembang sehingga produk UMKM memiliki nilai jual lebih dan konsumen mendapatkan kepastian akan kualitas produk yang bersih dan sehat.



Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Wamanggu dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 yang dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kab. Merauke, Kepala Pasar Wamanggu, Kader Keamanan Pasar, dan Pedagang Pasar Wamanggu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui penyebaran informasi dan sosialisasi produk keamanan pangan kepada pedagang/penjual pasar.



Program Desa/Kelurahan Pangan Aman yang mengintervensi Kelurahan Karang Indah di tahun 2025 ini telah mencapai tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2025 ini menghadirkan narasumber dari Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke, Minarto, S.Farm., Apt dan juga Lurah Karang Indah dalam hal ini sebagai Ketua Tim Keamanan Pangan Desa di Kelurahan Karang Indah, Willibrodus S. Duran, S.STP., M.AP.

Diharapkan dari kegiatan ini, para Kader Keamanan Pangan Desa dari Kelurahan Karang Indah sejumlah 5 (lima) orang dapat menjalankan rencana aksi yang telah disusun bersama untuk direalisasikan di tahun 2026



Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan di Kabupaten Merauke. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Halogen Merauke, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yeremias Paulus Ruben Ndiken, dan dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Merauke, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, RRI Merauke, Kepala UPTD Pasar Wamanggu, Kepala Distrik Merauke, Kepala Kelurahan Karang Indah, Kepala SMP YPPK Yoanes XXIII Merauke, Kepala SD Inpres Polder Merauke, dan para kader keamanan pangan.



Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah memasuki tahap keempat yaitu pelaksanaan monitoring dan sertifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 dan 28 Juli 2025 bertujuan untuk memastikan intervensi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah berhasil dilakukan secara mandiri. Pengecekan kantin dilakukan di SDN Polder dan SMP Yohanes XXIII Merauke sebagai target sekolah intervensi keamanan pangan di tahun 2025.



Kamis, 11 September 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan yang Aman di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini diikuti oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA), penjual jamu gendong, serta pelaku usaha kios, toko pangan, dan barang campuran. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar mampu memilih dan mengonsumsi obat dan makanan dengan aman terlindungi dalam memilih produk obat dan makanan dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).



Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan Jemput bola pendampingan pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Registrasi Nomor Izin Edar (NIE) Pangan Industri Kecil Mikro (IKM) di Kabupaten Merauke. Kegiatan ini disambut antusias oleh pelaku usaha karena dirasakan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan.



Badan POM terus berkomitmen mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025. Sebagai bagian dari advokasi, pada 29 Juli 2025 telah dilakukan pertemuan bersama Sekretaris Daerah untuk membahas pelaksanaan pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memastikan komitmen pemerintah daerah terhadap pengawasan pangan aman, sehat, dan berkualitas. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2025, BPOM kembali melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Perikanan, serta Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Merauke. Agenda ini difokuskan pada penyampaian informasi lanjutan serta pengumpulan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian mandiri.



Loka POM di kabupaten Merauke dalam pelaksanaan kegiatan *Food Security* dalam rangka pengawasan keamanan pangan VVIP Wakil Presiden RI di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Aspek pengawasan keamanan pangan mulai dari penerimaan bahan baku, selama pengolahan, hingga makanan dan minuman tersebut siap untuk disajikan. Pengamanan Keamanan Pangan dilakukan selama kunjungan kerja berlangsung pada tanggal 16-17 September 2025 yang dilaksanakan di beberapa titik yaitu Lanud J.A Dimara, MBG SMPN Sudang Arang, Rumah Makan Pinang Sirih, dan Swiss BelHotel.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan peraturan tersebut, perlu juga memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.

Laporan kinerja disusun untuk mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke, yang kemudian dievaluasi atau dinilai. Laporan kinerja berisi penjelasan atas setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 8 Sasaran Strategis dan 23 indikator kinerja utama (IKU), dimana masing - masing IKU memiliki target pencapaian setiap bulan. Target pencapaian inilah yang menjadi output kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke selama tahun 2025. Hasil akhir dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di tahun 2025 agar dapat memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

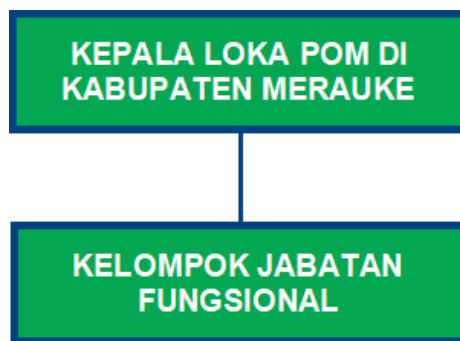
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Loka POM di Kabupaten Merauke terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel dapat menggunakan pesawat udara yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit atau melalui jalur darat yang membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Untuk menjangkau Kabupaten Mappi dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sedangkan untuk menjangkau Kabupaten Asmat dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur laut selama kurang lebih 1 jam.



Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Merauke

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Merauke

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam rangka melaksanakan tugas.

1.4.1. Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.
2. Pembentukan UPT di tingkat Kabupaten/Kota
Dengan terbentuknya UPT di kabupaten/kota ini akan meningkatkan jangkauan pengawasan Obat dan Makanan sampai ke pelosok, dan juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan. Penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan juga akan semakin menjangkau seluruh pelosok khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain itu dengan terbentuknya UPT BPOM di tingkat kabupaten/kota juga akan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terutama pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota,

hal ini akan meningkatkan percepatan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.

3. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan 30 September 2025 persentase pemenuhan analisis beban kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Merauke baru mencapai 77,42%. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas dan jabatan belum dapat terpenuhi sehingga dapat mengakibatkan inefisiensi alur kerja. Saat ini sebagian besar pegawai bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan diluar tugas utamanya. Untuk itu sangat dibutuhkan penambahan pegawai terutama di bidang dukungan manajemen agar beban kerja dapat terdistribusi merata dan dapat mengoptimalkan kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke. Selain belum terpenuhinya persentase ABK secara maksimal, SDM di Loka POM di Kabupaten Merauke juga masih memiliki kesenjangan kompetensi yang cukup besar. Beberapa pegawai masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas pokoknya. Kesenjangan kompetensi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan anggaran dan keterbatasan kuota untuk mengikuti pelatihan. Seringkali peserta pengembangan kompetensi dibatasi 1 orang per unit kerja setiap tahun, sehingga pegawai harus menunggu cukup lama untuk dapat mengikuti pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Sarana dan Prasarana

Tanah tempat bangunan kantor dan laboratorium Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini masih berstatus milik pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh hibah tanah tersebut agar dapat menjadi milik BPOM RI. Karena status tanah yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah maka sulit untuk melakukan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi standar pelayanan yang optimal. Lokasi kantor dan unit layanan pengaduan konsumen berada cukup jauh dari pusat kota menyebabkan masyarakat cukup kesulitan untuk mendapatkan pelayanan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh.

5. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini sudah berjalan cukup baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah belum ada SDM yang berkompeten dalam permasalahan teknologi informasi, sistem IT yang belum terintegrasi yang dapat mengakibatkan inefisiensi pekerjaan, dan seringkali terjadi masalah dari penyedia layanan komunikasi seperti putusnya kabel optik laut yang mengakibatkan hilangnya jaringan seluler dan internet di wilayah Merauke yang berimbas pada terhambatnya kinerja organisasi.

1.4.2. Isu Eksternal

1. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat
Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.
2. Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Sejalan dengan ini timbul banyak usaha - usaha Mikro di daerah termasuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dan rata - rata UMKM tersebut merupakan UMKM di bidang pangan, obat tradisional, dan kosmetik.
3. Kondisi Geografis
Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Akses ke kabupaten tersebut sebagian besar menggunakan pesawat perintis dengan jadwal penerbangan yang terbatas, sehingga untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah tersebut sangat bergantung pada ketersediaan transportasi. Beberapa daerah juga masih sangat sulit dijangkau karena terbatasnya sarana transportasi dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
4. Sinergitas Kelembagaan
Sinergitas antarlembaga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Merauke sangat memerlukan kerja sama dan bantuan dari pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan memerangi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan rencana 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029 diusung visi BPOM untuk rencana strategis 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas Utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah

produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada Lampiran I.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas,

fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran II.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. RAPK Loka POM di Kabupaten Merauke dapat dilihat dalam lampiran III.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna		
Tidak dapat disimpulkan	>110%			
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$			
Baik	$90\% \leq x \leq 100\%$			
Cukup	$60\% \leq x < 90\%$			
Kurang	$< 60\%$			

Tabel 1. 1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Nilai kinerja organisasi (NKO) diukur dari hasil penghitungan total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata). Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, sebagai berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna		
Istimewa	$>100\%$			
Baik	$80\% < x \leq 100\%$			
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$			
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$			
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 60\%$			

Tabel 1. 2 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diperoleh dari hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama pada Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi yang diperoleh pada triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada triwulan III tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 96,82% dengan predikat kinerja Baik.

Capaian kinerja untuk masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,55	108,39%
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0%
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	95	107,95%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	75	82,42%
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100	104,44%
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89%
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,40	99,55	107,74%

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	100	117,65%
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,67	11,68	104,78%
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,48	86,71	100,27%
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100	100%
Jumlah desa pangan aman	100	100	100%
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100%
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	65	91	140%
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	15	27,27%
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100%
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
Persentase implelementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	75	100%

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III

3.1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko

adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan Bersangkutan

Pada triwulan III, target indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 90 dengan realisasi sebesar 97,55 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 108,39% dengan predikat “istimewa”.

TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW
90	97,55	108,39%

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan target triwulan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Pada triwulan sebelumnya realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 99,44% dengan capaian kinerja sebesar 122,39%. Bila dibandingkan dengan triwulan saat ini terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini.

TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	REALISASI TW III
90	99,44	97,55

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

Bila dibandingkan dengan target tahunan yaitu sebesar 90, capaian kinerja untuk indikator ini masih berada pada nilai 108,39% yang termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
90	90	97,55	108,39%	108,39%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU I

d. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Sampai dengan akhir triwulan III telah dilaksanakan sampling terhadap 67 sampel sesuai dengan perencanaan. Pemilihan kategori sampel dilakukan berdasarkan kemampuan uji laboratorium, sehingga masih mungkin terjadi perubahan perencanaan disesuaikan dengan kondisi laboratorium penguji.

Jumlah produk yang harus ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Merauke cukup banyak dan telah ditindaklanjuti secara maksimal, namun masih belum bisa mengcover seluruh *catchment area* khususnya di luar Kabupaten Merauke terutama untuk produk OT dan Kosmetik. Pada triwulan III, indikator ini mengalami perubahan target sesuai dengan hasil revidi dari unit pengampu dan kesepakatan dengan unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Untuk meminimalisir kendala yang terjadi pada saat pengiriman sampel, kegiatan sampling dilakukan lebih awal yaitu 15 hari kerja sebelum tenggat penerimaan sampel di laboratorium pengujian yaitu di tanggal 5 setiap bulan berjalan. Untuk pelaporan melalui SIPT dilakukan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling agar data dapat tersampaikan ke balai pengujian secara tepat waktu dan apabila ada kendala dapat segera ditindaklanjuti.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- kesesuaian target sampel UPT;
- kesesuaian parameter uji;
- ketepatan pengambilan kesimpulan;
- ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- ketepatan pelaporan sampling dan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan Bersangkutan

Sampai dengan bulan September 2025, capaian kinerja indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 117,65% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW
85	100	117,65%

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III IKU 2 dengan Target Bersangkutan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	REALISASI TW III
85	100	100

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2 dengan Triwulan Sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian indikator ini juga sebesar 117,65% yang termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
85	85	100	117,65%	117,65%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 7 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 2

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Sesuai dengan perencanaan petugas telah melaksanakan sampling sesuai target sebanyak 42 sampel. Sampel kemudian dikirim ke regional Jayapura untuk dilakukan pengujian. Pemilihan parameter disesuaikan dengan pedoman sampling dan kemampuan uji regional Jayapura. Sampling diprioritaskan di sarana yang memiliki *track record* TMS (tidak memenuhi syarat), sampel yang belum disampling di tahun sebelumnya, dan mengacu pada daftar riwayat TMS sampel periode sebelumnya. Pelaporan melalui SIPT dilaksanakan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling. Apabila ditemukan sampel yang TMS penandaan, maka akan dilaporkan melalui SIPT. Pada triwulan III, indikator ini mengalami perubahan target sesuai dengan hasil revidi dari unit pengampu dan kesepakatan dengan unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Untuk meminimalisir kendala yang terjadi pada saat pengiriman sampel, kegiatan sampling dilakukan lebih awal yaitu 15 hari kerja sebelum tenggat penerimaan sampel di laboratorium pengujian yaitu di tanggal 5 setiap bulan berjalan. Untuk pelaporan melalui SIPT dilakukan maksimal 5 HK setelah pelaksanaan sampling agar data dapat tersampaikan ke balai pengujian secara tepat waktu dan apabila ada kendala dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaan kegiatan sampling di luar wilayah Kabupaten Merauke, petugas cukup terkendala karena varian produk yang terbatas dan juga kuantitas produk yang sangat sedikit. Sehingga kegiatan sampling sebagian besar dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Merauke. Selain itu, target untuk sampel pangan import sulit dicapai karena keterbatasan jumlah dan jenis sampel pangan import di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampai dengan akhir triwulan III belum ditemukan kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan sampling KLB apabila ditemukan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM

di Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan Bersangkutan

TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW
88	95	107,95%

Tabel 3. 8 Perbandingan realisasi dengan target triwulan bersangkutan

Dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran untuk beberapa program prioritas nasional, target sampel PIRT dikembalikan menjadi 4 sampel yang sebelumnya hanya ditargetkan 2 sampel. Sampai dengan September 2025, capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 107,95% dengan realisasi sebesar 95 dari target 88.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	REALISASI TW III
88	95	95

Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, realisasi kinerja pada indikator ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan karena seluruh target yang ditetapkan telah dicapai pada triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
88	88	95	107,95%	107,95%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 4

Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori tercapai/melampaui dengan nilai capaian sebesar 107,95%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Sampai akhir triwulan II, 4 sampel yang menjadi target seluruhnya telah disampling dan diuji. Dengan demikian diperkirakan sampai dengan akhir tahun, target untuk indikator ini telah tercapai. Dalam pelaksanaan kegiatan sampling terdapat kategori sampel PIRT yang seharusnya disampling sesuai pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, namun sampel tersebut tidak dapat ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke karena kurangnya variasi produk. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk perubahan kategori sampling yang awalnya kategori minuman serbuk botanical, menjadi kategori bumbu PIRT.

Variasi kategori pangan yang beredar di wilayah Papua Selatan terbatas dan masa kedaluarsa yang singkat hambatan dalam penentuan kategori sampling.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sampling terus dilakukan sesuai timeline dan prioritas sampling PIRT, sehingga target dapat tercapai sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, dan saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan Bersangkutan

TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW
91	75	82,42%

Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan bersangkutan

Sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kabupaten Merauke telah mengeluarkan 24 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dan 17 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Pada triwulan III, target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 91%, namun baru dapat terpenuhi sebesar 82,42% sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 82,42% dengan kategori cukup.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan triwulan sebelumnya

TARGET TAHUNAN	REALISASI TW II	REALISASI TW III
91	27,78	75

Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya realisasi kinerja untuk indikator ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada triwulan II realisasi sebesar 27,78% dan pada triwulan III realisasi sebesar 75% dikarenakan rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor telah ditanggapi dan ditindaklanjuti.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan

Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 82,42% dan termasuk ke dalam kategori akan tercapai.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
91	91	75%	82,42%	82,42%	 Akan tercapai

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi TW III dengan Capaian Tahunan IKU 5

Dengan nilai realisasi sebesar 75 pada triwulan III, indikator ini diperkirakan akan mencapai target pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Sampai dengan akhir triwulan III, capaian pada indikator ini masih cukup rendah dikarenakan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, pelaku usaha membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga seringkali melewati batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan perbaikan yaitu 21 HK. Selain itu, waktu pemeriksaan sarana yang dilaksanakan di akhir triwulan sehingga tindak lanjut dari pelaku usaha belum diterima.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Untuk mencapai kinerja sesuai target, akan dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam membuat laporan CAPA (*Corrective Action, Preventive Action*) dan secara berkala melakukan monitoring kemajuan tindakan perbaikan yang dilakukan pelaku usaha. Selain upaya pendampingan, juga akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke) yang melaksanakan pemeriksaan sarana menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari BPOM agar tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dapat dijadikan data dukung untuk tindak lanjut atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke.

6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target Triwulan bersangkutan

TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW
91	100	109,89%

Tabel 3. 14 Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dan target triwulan III

Pada triwulan III, realisasi kinerja pada indikator ini telah mencapai 109,89% yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan untuk triwulan III.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III
91	0	0	100

Tabel 3. 15 Perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan dengan kinerja pada triwulan sebelumnya, realisasi kinerja indikator ini terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target pada triwulan III.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
91	91	100	109,89%	109,89%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 6

Bila dibandingkan dengan target tahunan, realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melampaui target tahunan pada triwulan III.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Sampai dengan akhir triwulan III 2025, kinerja indikator ini telah direalisasikan melampaui target triwulan dan tahunan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung keberhasilan capaian pada indikator ini Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat di awal tahun.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Perhitungan capaian indikator ini dilihat dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang diperiksa.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan III

TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW
91	100	109,89%

Tabel 3. 17 Perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan III

Bila dibandingkan dengan target triwulan III, capaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melampaui target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan TW sebelumnya

TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III
91	0	100	100

Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi kinerja TW III dengan triwulan sebelumnya.

Realisasi indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mengalami peningkatan dari triwulan I sampai III, dan telah melampaui target tahunan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
91	91	100	109,89%	109,89%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 19 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 7

Pada triwulan III telah dilaksanakan pemeriksaan sarana produksi terhadap 11 sarana produksi pangan olahan. Dengan hasil realisasi indikator sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target tahunan yaitu 91, capaian kinerja untuk indikator ini telah mencapai 109,89%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Pemeriksaan sarana sampai dengan akhir triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Walaupun sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sebagian besar berskala UMKM sehingga cukup kesulitan untuk memenuhi aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), namun Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya untuk melaksanakan pengawasan dengan maksimal.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sampai dengan bulan September 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan pengawasan terhadap 84 sarana distribusi Sediaan Farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

Target tahunan untuk indikator ini adalah sebesar 95,75% dan sampai dengan akhir triwulan III 2025 telah direalisasikan sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target triwulan II dan tahunan, kinerja pada indikator ini telah mencapai 104,44%.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
95,75	95,75	100	104,44%	104,44%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 20 Perbandingan realisasi TW II dengan target tahunan IKU 8

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa sarana yang menjadi target pemeriksaan hanya beroperasi di luar jam kerja sehingga petugas cukup kesulitan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana tersebut.

Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya untuk melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan target dan perencanaan. Tindak lanjut juga akan dilaksanakan sesegera mungkin dan dilaporkan melalui SIPT.

9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- Ketepatan waktu pelaporan
- Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Pada triwulan III 2025, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target triwulan III yaitu sebesar 91 maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 109,89%. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 109,89% dengan kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
91	91	100	109,89%	109,89%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 21 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 9

Pada triwulan III, target indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami perubahan target yang awalnya 80 menjadi 91 karena adanya penyesuaian dari unit pengampu.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya agar dapat menjangkau seluruh sarana produksi di wilayah kerja, namun karena keterbatasan anggaran, untuk tahun 2025 pengawasan dimaksimalkan untuk dilaksanakan di Kabupaten Merauke saja. Loka POM di Kabupaten Merauke terus berupaya untuk melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan target dan perencanaan. Tindak lanjut juga akan dilaksanakan sesegera mungkin dan dilaporkan melalui SIPT.

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Pada triwulan III 2025, pengawasan iklan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan realisasi kinerja sebesar 99,55% dari target 92,40 sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 107,74% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 107,74% dan termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
92,40	92,40	99,55	107,74%	107,74%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 22 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 10

Pengawasan iklan akan dilakukan sesuai renlak yang telah disusun dan berpedoman pada pedoman pengawasan iklan di setiap komoditi. Untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan, pengawasan iklan dilakukan dan diinput di SIPT setiap akhir bulan untuk target pengawasan bulan berjalan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan iklan adalah media iklan untuk komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan selain internet dan website lainnya cukup sulit ditemukan. Media luar ruang untuk iklan komoditi pangan dan kosmetik terbatas dan kurang bervariasi. Sedangkan untuk iklan komoditi pangan, target proporsi media penyiaran terikat pada waktu dan tanggal pengawasan sehingga iklan yang diperoleh terbatas.

Dalam melaksanakan pengawasan iklan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, terus diupayakan agar pencapaian target dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan.

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

SKL tingkat 2 dan 1 (Laboratorium Loka POM di Kab/Kota) terdiri 3 komponen yaitu:

- Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
- Standar Peralatan;
- Standar Kompetensi Laboratorium.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium loka dan balai POM kabupaten/kota tingkat 1 dan tingkat 2, nilai pemenuhan SKL Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan III adalah 11,18, sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar 104,78% bila dibandingkan dengan target triwulan dan termasuk ke dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini

adalah sebesar 101,64% dan termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
10,67	11	11,18	104,78%	101,64%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 23 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 11

Dikarenakan adanya perubahan tools perhitungan pada awal tahun, pada triwulan III telah diajukan revisi target bulanan menjadi 10,67. Realisasi telah sesuai dengan simulasi perhitungan SKL.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan capaian indikaot indikator ini adalah verifikasi pengujian yang rencananya akan dilaksanakan di triwulan IV, dilaksanakan lebih awal di triwulan III karena reagen yang dibutuhkan tersedia lebih cepat.

12. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Sampai dengan akhir triwulan III, realisasi nilai efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Merauke adalah 86,71 sehingga capaian kinerja untuk indikator tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan adalah 100,27% dan telah memenuhi target nilai 86,48 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 100,27% dan termasuk dalam kategori tercapai/melampaui.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
86,48	86,48	86,71	100,27%	100,27%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 24 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 12

Selama semester II telah dilaksanakan KIE melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial dan

media cetak. Dari hasil survey yang diperoleh, dari 4 indikator yang dinilai. Secara keseluruhan nilai indeks total telah tercapai sesuai target. Namun nilai indeks KIE Tatap muka masih belum tercapai. Responden masih kurang memahami dan mengingat pesan-pesan keamanan Obat dan Makanan yang telah disampaikan melalui KIE dan belum sepenuhnya dapat menerapkan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Di periode selanjutnya pesan-pesan KIE akan dibuat lebih menarik dan menggunakan bahasa yang lebih ringan dan mudah dipahami masyarakat. Petugas juga akan lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk menerapkan keamanan Obat dan Makanan dalam kehidupan sehari-hari.

13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan mulai dari Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah sampai dengan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Dengan terlaksananya seluruh tahapan kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 5.000% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah sekolah yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan persentase proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
100	2	100	100%	5000%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 25 Perbandingan realisasi triwulan III dengan target tahunan IKU 13

Sekolah yang ditargetkan melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan sekolah yang dipilih berdasarkan koordinasi dan merupakan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Merauke. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan tidak ditemukan kendala yang berarti namun dibutuhkan keaktifan dari kader sekolah yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal.

14. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan kegiatan. Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan seperti Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan di Desa, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dengan terlaksananya seluruh tahapan kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 10.000% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah desa yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
100	1	100	100%	10.000%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 26 Perbandingan realisasi triwulan III dengan target tahunan IKU 14

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahapan kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan. Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan keaktifan dan respon yang baik dari kader keamanan pangan yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline kegiatan.

15. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan berbagai tahapan kegiatan untuk program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan seperti Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan sampai kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan tersebut maka capaian kinerja indikator ini adalah 100% dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 10.000% dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian kinerja tahunan cukup besar karena target tahunan menggunakan jumlah pasar yang akan diintervensi, sedangkan target di setiap triwulan dihitung menggunakan persentase proses dari setiap tahapan kegiatan.

TARGET TW II	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
100	1	100	100%	10.000%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 27 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 15

Target awal merupakan target yang ditetapkan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahapan kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan. Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan keaktifan dan respon yang baik dari kader keamanan pangan yang telah ditunjuk agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal. Untuk periode selanjutnya tahapan kegiatan akan tetap dilaksanakan sesuai timeline kegiatan.

16. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pada triwulan III telah dilaksanakan pendampingan terhadap UMKM Pangan Olahan serta Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik. Capaian kinerja indikator ini pada triwulan III adalah 140% dengan kategori tercapai/melampaui. Bila dibandingkan dengan target tahunan capaian kinerja indikator ini termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras dengan nilai capaian sebesar 6,67%.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
65	13,64	91	140%	6,67%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 28 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 16

Pada triwulan III, terdapat perubahan Manual IKU dan penyesuaian cara perhitungan untuk indikator ini.

Dalam melaksanakan pendampingan kepada UMKM, ditemukan beberapa kendala yaitu:

- Semua UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi.
- UMKM kurang aktif dan inisiatif dalam proses pendampingan
- Efisiensi anggaran membuat beberapa tahapan pendampingan UMKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Efisiensi anggaran juga menyebabkan UMKM yang didampingi hanya UMKM yang berada di dalam Kabupaten Merauke dan tidak dapat dilaksanakan di luar Kabupaten Merauke.
- Beberapa pelaku usaha kesulitan biaya untuk pengujian produk risiko tinggi.

Untuk menindaklanjuti dan meminimalisir kendala yang terjadi, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi.
- Fasilitator lebih aktif dalam menginformasikan progress pendampingan kepada UMKM.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersisa dalam melakukan pendampingan UMKM.

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan.

Realisasi kinerja pada triwulan III adalah 15 dengan capaian kinerja juga 27,27%. Bila dibandingkan dengan target tahunan, capaian kinerja indikator ini adalah 20% dan termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
55	75	15	27,27%	20%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 29 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 17

Sampai dengan triwulan III, penyelesaian perkara telah memasuki tahap P21 (Tahap 2), namun tenggat waktu penyelesaian mundur karena tersangka melalui penasehat hukum mengajukan pra peradilan pada bulan Agustus sehingga Loka POM di Kabupaten Merauke fokus untuk menghadapi pra peradilan tersebut sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan intelijen sampai wasmalitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan). Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut belum ditemukan kasus yang berpotensi untuk dinaikkan menjadi perkara. Untuk periode berikutnya kegiatan intelijen akan dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Merauke, terutama untuk wilayah yang belum pernah dijangkau. Petugas juga akan lebih aktif berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen BPOM dan lintas sektor terkait untuk melakukan pengawasan peredaran penyalahgunaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Capaian kinerja indikator ini pada triwulan II adalah sebesar 100% dengan realisasi sesuai target yaitu 50% dan termasuk ke dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target tahunan yaitu 90, capaian kinerja indikator ini adalah 55,56% yang masih termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIA N TW	CAPAIA N TAHUNAN	KATEGORI
50	90	50	100%	55,56%	 Perlu upaya keras

Tabel 3. 30 Perbandingan realisasi triwulan II dengan target tahunan IKU 18

Laporan analisis kejahatan diambil dari data kerawanan kejahatan selama 1 tahun yang kemudian dibuat menjadi tren analisis. Pada triwulan ini masih dilaksanakan pengumpulan informasi melalui patroli siber, intelijen dan wasmalitrik. Dalam melaksanakan patroli siber kadang ditemukan akun yang sulit untuk ditelusuri dan dilakukan verifikasi. Untuk periode selanjutnya akan dilaksanakan perluasan sumber data untuk patroli siber dan melaksanakan kegiatan sesuai target perencanaan.

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai akan diperoleh di triwulan IV tahun 2025.

Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan sesuai rencana aksi, diantaranya adalah:

- Menetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis layanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke melibatkan unsur masyarakat dalam proses penyusunannya, serta dilakukan monev.
- Melakukan publikasi Standar Pelayanan pada (1)Media Cetak/Non Elektronik (2) Media Elektronik (TV, layar monitor, e-Kiosk, link publikasi, dan sejenisnya); (3) Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan sejenisnya); (4) Website Loka POM di Kab. Merauke; (5) Aplikasi yang bisa diunduh melalui PPID BPOM Mobile; dan (6) SIPP.

20. Nilai AKIP UPT BPOM

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP akan dikeluarkan di TW IV setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

21. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Nilai kinerja anggaran akan diperoleh di akhir tahun.

Dengan adanya kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Loka POM di Kabupaten Merauke mengalami perubahan cukup banyak dan berpengaruh terhadap capaian kinerja. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target kinerja yang akan dicapai.

22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan di semester II sehingga nilai akan diperoleh di akhir tahun.

23. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Pada triwulan III, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori baik. Bila dibandingkan dengan target tahunan,

capaian kinerja yang diperoleh adalah 75% yang termasuk dalam kategori akan tercapai.

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
75	100	75	100%	75%	 Akan tercapai

Tabel 3. 31 Perbandingan realisasi TW III dengan target tahunan IKU 23

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke akan melaksanakan rencana aksi RB secara rutin dan melaksanakan pelaporan secara tepat waktu.

Pada triwulan III, terdapat penambahan 3 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman yang pengukuran kinerjanya akan dilaksanakan di akhir tahun.
2. Persentase pemenuhan target pendendalian AMR di wilayah Loka POM di Kabupaten Merauke yang penilaiannya akan dilaksanakan pada akhir tahun.
3. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan. Untuk indikator ini pengukuran kinerja dilaksanakan mulai bulan Agustus.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

TARGET TW III	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN TW	CAPAIAN TAHUNAN	KATEGORI
85	85	100	117,65%	117,65%	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 32 Perbandingan capaian kinerja TW III indikator Label produk tembakau

Sampai dengan akhir triwulan III, capaian kinerja untuk indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan telah melampaui target yang ditetapkan. Karena pengukuran kinerja pada indikator ini baru dilaksanakan pada triwulan III, maka capaian kinerja indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan label produk tembakau telah dilaksanakan sesuai perencanaan walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti produk rokok yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sehingga kemungkinan merek rokok yang disampling akan sama atau berulan tiap bulannya.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

3.2.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***	TIMELINE	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Targetnya terlalu rendah dan saat desk renstra sudah dinaikkan menjadi 90. Semua sampling sudah sesuai. ketepatan pelaporan sampling dan uji khususnya komoditi obat ada sampel bulan Juni (obat kategori lain" (water for injection)) blm dapat dilaporkan tepat waktu di SIPT krna belum dapat diuji sterilitas karena reagen habis dan indent 1-2 bulan.	Melakukan perubahan target untuk TW III dan target tahunan. Melakukan monitoring pengujian sampel yang belum dilaporkan karena reagen habis (BBPOM Makassar) Berkoordinasi dengan balai regional apabila ada <i>force major</i> dalam sampling dan pengujian.	TW III	Telah melakukan perubahan target untuk TW III dan target tahunan. Telah dilakukan monitoring pengujian sampel yang belum dilaporkan karena reagen habis (BBPOM Makassar). Telah dilakukan koordinasi dengan Balai regional.			Target telah direvisi dan telah dilakukan monitoring Koordniasi terkait sampel ke Balai regional
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Variasi sampel di kabupaten luar Merauke terbatas, kuantitas sampel terbatas. keterbatasan anggaran karena efisiensi.	Melakukan usulan kenaikan target tahunan dan TW berikutnya agar realisasi tercapai sesuai kriteria. melaksanakan sampling di Kab. Merauke yg memiliki lebih banyak varian sampel/produk.	Sepanjang tahun	Melakukan usulan kenaikan target tahunan dan TW berikutnya agar realisasi tercapai sesuai kriteria. melaksanakan sampling di Kab. Merauke yg memiliki lebih banyak varian sampel/produk.			Target telah direvisi dan telah dilakukan sampling dengan variasi produk
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Belum ada KLB KP di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Penetapan status KLB merupakan kewenangan dinkes.	Koordinasi dengan lintas sektor terkait	Sepanjang tahun		Koordinasi dengan lintas sektor terkait	TW IV	
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	sudah terealisasi 2 sampel di TW I dan 2 sampel di TW II. Ada kategori sampel PIRT yg harusnya disampling sesuai pedoman sampling yg ditetapkan wasdar PO, tapi sampel tidak ditemukan di wilayah kerja Loka Merauke yaitu sampel kategori minuman serbuk botanical. Bersurat ke Ditwasdar PO untuk perubahan kategori sampling menjadi kategori PIRT bumbu dan telah disetujui. Variasi kategori pangan yg beredar di wilayah Papua Selatan terbatas, masa kedaluarsa singkat sehingga menjadi hambatan dalam penentuan kategori sampling.	Sampling PIRT telah direalisasikan sesuai target tahunan.	Sepanjang tahun	Sampling PIRT telah direalisasikan sesuai target tahunan.			Target akan tercapai di akhir tahun
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sudah di berikan Google form ke IAI, namun belum diisi. telah dilakukan permintaan CAPA tapi belum ditindaklanjuti. TL yg disampaikan belum mencapai batas waktu 21 HK karena pemeriksaan Mei, sehingga capaian kemungkinan masuk di TW III.	Kedepannya ada dana DAK dan Dinas Kesehatan Kab. Merauke akan melaksanakan pemeriksaan jadi laporan hasil pemeriksaan mereka akan dijadikan daduk TL Loka Merauke. koordinasi aktif dengan lintas sektor dan pelaku usaha. sarana yg kemungkinan lambat menindaklanjuti TL, dikeluarkan dari perhitungan capaian bulan tersebut.	Sepanjang tahun		Rutin mengingatkan pihak sarana untuk menyelesaikan TL CAPA	TW IV	Target akan tercapai di akhir tahun
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Hanya 1 sarana untuk sediaan farmasi OT (kapsul albumin) yg masuk perencanaan TW III.	Melaksanakan pemeriksaan di TW III	TW III	Sudah dilaksanakan Pemeriksaan 1 sarana di SMKS Yaleka Maro.			Target akan tercapai di akhir tahun

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana produksi pangan sebagian besar berskala UMKM sehingga agak sulit utk melakukan pemenuhan aspek" CPPOB seperti dokumentasi dan administrasi.	Melakukan pemeriksaan sesuai perencanaan	Sepanjang tahun	Melakukan pemeriksaan sesuai perencanaan.	TW IV	Target akan tercapai di akhir tahun	
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Beberapa sarana merupakan target pemeriksaan tahun ini yang termasuk risiko tinggi namun hanya beroperasi di luar jam kerja sehingga petugas kesulitan untuk memeriksa.	Melaksanaan pemeriksaan sesuai perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut	Sepanjang tahun	Sarana yang tidak jadi diperiksa akan dijadikan target di tahun berikutnya	2026	Target akan tercapai di akhir tahun	
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target di TW III sudah dinaikkan.	Melaksanakan pemeriksaan sesuai perencanaan dan ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut	Sepanjang tahun	Melakukan pemeriksaan sesuai perencanaan (Intensifikasi Nataru)	TW IV	Target akan tercapai di akhir tahun	
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Media iklan untuk komoditi OT/SK sulit diperoleh seperti website dan internet lainnya. Media luar ruang untuk komoditi pangan dan kosmetik terbatas dan kurang bervariasi. Target proporsi media penyiaran untuk komoditi pangan terikat pada waktu dan tanggal pengawasan sehingga iklan yang diperoleh terbatas.	Pelaporan dilaksanakan sesuai perencanaan dan melaporkan tepat waktu.	Sepanjang tahun	Pelaporan dilaksanakan sesuai perencanaan dan melaporkan tepat waktu.		Target akan tercapai di akhir tahun	
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Beberapa alat laboratorium yg direncanakan akan diadakan tahun ini harganya meningkat 2 kali lipat dari perencanaan sehingga memerlukan revisi anggaran. Relaksasi anggaran hanya terjadi di UPT, tetapi di unit pengampu tidak. Ada pelatihan luring yg direncanakan namun dari unit pengampu tidak ada sehingga anggaran pelatihan tidak terpakai. sehingga harus mencari UPT lain untuk pelatihan. di Juli direncanakan pelatihan di BBPOM Jayapura. Pengadaan reagen sudah, baku sudah dari PPPOMN, dari Jayapura sudah.	1) Melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan alat laboratorium 2) Berkoordinasi dengan BBPOM di Jayapura tentang Pelatihan Verifikasi Antara dan Evaluasi Kalibrasi yang akan di selenggarakan pada tanggal 23 Juli -1 Agustus supaya dapat ikut sebagai peserta tambahan	TW III	1. Telah di laksanakan revisi anggaran untuk pemenuhan alat laboratorium 2. Telah terlaksana Pelatihan Verifikasi Antara dan Evaluasi Kalibrasi yang akan di selenggarakan pada tanggal 23 Juli -1 Agustus 2025.		Target akan tercapai di akhir tahun	
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Indeks Eff. KIE Tatap Muka tidak tercapai (pendapat responden KIE tidak dapat dikendalikan sesuai keinginan).	Menerima saran dan masukan dari responden untuk pelaksanaan KIE tatap muka agar lebih menarik dan menjangkau lebih baryak peserta	Sepanjang tahun	Menerima saran dan masukan dari responden untuk pelaksanaan KIE tatap muka agar lebih menarik dan menjangkau lebih baryak peserta		Meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya	
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kader sekolah kurang responsif. Timeline kegiatan bersamaan dengan kegiatan akhir semester sehingga kader di sekolah sibuk.	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.	TW III	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.		Meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya	
14	Jumlah desa pangan aman	Beberapa kader kurang responsif sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.	TW III	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.		Meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya	
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Beberapa kader kurang responsif sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.	TW III	Petugas aktif dalam membimbing dan mendampingi kader keamanan pangan.		Meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya	

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Efisiensi anggaran menyebabkan UMKM yg didampingi hanya di dalam Kab. Merauke dan tidak dapat dilakukan di luar wilayah Kab. Merauke. Pelaku usaha kurang kooperatif saat pendampingan, sulit untuk menyesuaikan waktu pendampingan. Target tahunan direvisi. Beberapa pelaku usaha kesulitan biaya untuk pengujian produk risiko tinggi.	1) Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi 2) Target direalisasikan sesuai SK pendampingan meskipun ada efisiensi anggaran. 3) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pendampingan agar dapat berjalan sesuai target.	Sepanjang tahun	1) Fasilitator membantu langsung UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi 2) Target direalisasikan sesuai SK pendampingan meskipun ada efisiensi anggaran. 3) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pendampingan agar dapat berjalan sesuai target.			Target akan tercapai di akhir tahun
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Sampai Juni belum ada sarana yang memenuhi unsur untuk di pro justitia, tetapi perencanaan target penyidikan dilaksanakan di bulan Juli.	Melakukan operasi penindakan sesuai hasil wasmatlitrik TW II	TW III	Telah Melakukan operasi penindakan sesuai hasil wasmatlitrik.			Meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi menunggu surat. Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Hasil patroli siber masih kesulitan dalam mencari alamat sarana.	Melaksanakan kegiatan patroli siber, profiling kejahatan, dan menindaklanjuti rekomendasi analisis kejahatan dari direktorat cegah tangkal.	Sepanjang tahun		Melaksanakan kegiatan patroli siber, profiling kejahatan, dan menindaklanjuti rekomendasi analisis kejahatan dari direktorat cegah tangkal.	TW IV	Target akan tercapai di akhir tahun
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aspek pelayanan publik	Melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan aspek pelayanan publik	Sepanjang tahun	Melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan aspek pelayanan publik			Target akan tercapai di akhir tahun
20	Nilai AKIP UPT BPOM	Sudah dilaksanakan pengisian LKE Evaluasi AKIP untuk tahun 2024, tinggal menunggu jadwal desk dengan inspektorat. Untuk unsur-unsur dari perencanaan sampai pelaporan telah diusahakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan.	Melaksanakan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai pedoman AKIP	Sepanjang tahun		Melaksanakan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai pedoman AKIP	TW IV	Target akan tercapai di akhir tahun
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Efisiensi anggaran dan relaksasi yang tidak ditau munculnya kapan sehingga mempengaruhi nilai IKPA. Nilai IKPA masih memperhitungkan pagu blokir, sehingga nilai realisasi anggaran masih kecil.	Mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai target	Sepanjang tahun		Mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai target	TW IV	Target akan tercapai di akhir tahun
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Kurangnya <i>awareness</i> dari pegawai dalam penerapan manajemen risiko, sekarang sudah SPIPT nanti akan ada juknis pelaksanaan, harusnya dilaporkan di Juli namun masih menunggu apakah ada perubahan pelaksanaan dan pelaporan risiko.	Melaksanakan bimtek sistem manajemen pengawasan obat dan makanan	TW III	Telah mengikuti bimtek sistem manajemen pengawasan obat dan makanan			
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Pelaporan disiplin, apel, gratifikasi dan benturan kepentingan telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu	Melaksanakan pelaporan disiplin, apel, gratifikasi, dan benturan kepentingan tepat waktu	Sepanjang tahun				

Tabel 3. 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

3.2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM***		
						RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Jumlah produk yang harus di TL oleh Loka Merauke dari pusat cukup banyak, telah dilakukan TL secara maksimal, namun masih belum dapat mencakup cathmant area terutama untuk daerah diluar kab. Merauke. produk terutama OT dan Kosmetik.	1. Memaksimalkan pelaporan monitoring TL 2. Melakukan koordinasi dengan pihak sarana terkait ketersediaan produk yang di tarik dari peredaran	TW IV				
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat target sampel pangan import yang tidak bisa dicapai, karena keterbatasan jumlah dan jenis sampel pangan import di wilayah kerja loka pom merauke.	1. Memaksimal sampling dengan ketersediaan sampel yang ada di Kab. Merauke 2.	TW IV				
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada KLB KP di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Status KLB merupakan kewenangan dinkes.	Koordinasi dengan lintas sektor terkait	Sepanjang Tahun				
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sudah terealisasi 2 sampel di TW I dan 2 sampel TW II, jumlah 4 sampel PIRT.	Sampling PIRT telah direalisasikan sesuai target tahunan.	-				
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Di kab. Asmat masih ada beberapa sarana yang belum memberikan CAPA. Jumlah CAPA yang belum dilakukan TL (sarana 5), Linsek (7)	1. Rutin mengingatkan pihak sarana untuk menyelesaikan TL CAPA	TW IV				
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat sarana kosmetik (1 sarana), OT (2 sarana)). untuk sarana OT ada 2 sarana, yg 1 (UKOT bumin fish) blm di periksa karena tidak aktif (sakit). yang yaleka baru mau rencana pengantian PJ, sehingga belum mengajukan untuk proses reg izin Edar.	1. Membuat TL hasil pemeriksaan sarana produksi OT dan Kosmetik	TW IV				
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Total sarana 14 yang diperiksa. 2. Waktu pemeriksaan ke sarana UMKM tidak setiap hari melakukan produksi, sehingga saat melakukan sidak, Sarana harus diberi tahu dahulu (melakukan janji). 3. Saat melakukan pemeriksaan bila UMKM tidak melakukan produksi, petugas hanya mengecek dokumen saja tanpa melihat proses produksi, sehingga pemeriksaan tidak maksimal.	1. Untuk UMKM yang tidak melakukan produksi setiap hari tetap di infokan saat akan dilakukan pemeriksaan ke sarana oleh petugas agar pemeriksaan dapat berjalan dengan maksimal	TW IV				
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Pemeriksaan belum maksimal di lakukan di semua wilayah kerja Loka POM Merauke 2. Ada beberapa sarana di luar kab. Merauke yang sudah ditargetkan, namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata sarananya tutup.	1. Sarana yang tidak jadi diperiksa akan dijadikan target di tahun berikutnya	2026				
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Sisa sarana (23), akan diperiksa saat melakukan Intensifikasi Nataru. 2. Pelaksanaan pemeriksaan Intensifikasi Nataru hanya dilakukan di dalam kota (kab. Merauke) saja karena keterbatasan anggaran	1. Melakukan pemeriksaan sesuai perencanaan	TW IV				
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Iklan media luar ruang (Kosmetik dan OT) - (Videotrone, neon box, poster, spanduk, banner) sangat terbatas di Wilker Loka Merauke.	1. Memaksimalkan pengawasan iklan pada media lain (Medsos dan media elektronik)	TW IV				

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM*** RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Sampel yang digunakan untuk verifikasi belum semuanya termasuk dalam sampel rutin, sehingga harus mencari sample mandiri.	1. Mencari sampel mandiri di sarana PKM dan RS.	TW IV				
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kurangnya minat responden untuk membaca dengan baik keseluruhan pertanyaan survei efektivitas KIE sehingga pengisian survey tidak menggambarkan pelaksanaan KIE yang sebenarnya.	Membantu responden untuk mengisi survei dengan cara membacakan dan menjelaskan terkait maksud pertanyaan.	TW IV				
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1. Kader sekolah kurang responsif. 2. Persentase capaian tahunan tinggi karena target tahunan bukan dalam bentuk persentase namun dalam bentuk target jumlah sekolah yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan. 3. Terdapat 4 tahapan dan telah di capai pada bulan Juli (100%).	Target telah tercapai pada bulan Juli	-				
14	Jumlah desa pangan aman	1. sebagian kader kurang aktif. 2. Persentase capaian tahunan tinggi karena target tahunan bukan dalam bentuk persentase namun dalam bentuk target jumlah sekolah yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan. 3. Terdapat 4 tahapan dan telah di capai pada bulan Juli (100%).	Target telah tercapai pada bulan Juli	-				
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1. sebagian kader kurang aktif. 2. Persentase capaian tahunan tinggi karena target tahunan bukan dalam bentuk persentase namun dalam bentuk target jumlah sekolah yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan. 3. Terdapat 4 tahapan dan telah di capai pada bulan Juli (100%).	Target telah tercapai pada bulan Juli	-				
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1. Pelaku usaha kurang kooperatif saat pendampingan, sehingga petugas sulit untuk menyesuaikan waktu pendampingan dengan pelaku usaha. 2. Parameter uji untuk sampel UMKM yang dibantu uji oleh Loka Merauke saat ini tidak semuanya bisa di ujikan di BPOM Jayapura karena mengikuti parameter uji pada pedoman sampling sehingga pelaku usaha harus melakukan pengujian mandiri di laboratorium rujukan untuk parameter logam berat As, Hg, Cd, Sn, PK Lemak, PK Protein). (Perhitungan RHPK berubah)	1. Petugas rutin melakukan pendampingan, dan aktif melakukan koordinasi dengan pelaku usaha terkait kendala dalam mengurus dokumen-dokumen dan penggunaan aplikasi untuk mengurus izin edar. 2. Bersurat ke kepala BPOM Jayapura dengan tembusan ke Unit pengampu terkait permohonan bantuan pengujian semua parameter registrasi.	TW IV				
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Perencanaan penyelesaian perkara pada bulan September/Oktober sudah masuk tahap P21 (Tahap 2), namun Timeline mundur karena tersangka melalui Penasehat Hukum mengajukan pra peradilan pada bulan Agustus sehingga Loka Merauke fokus untuk menghadapi pra peradilan.	1. Terus berkoordinasi dengan korwas PPNS Polres Merauke dan kejaksaan negeri merauke untuk penyelesaian berkas perkara hingga P21 dan Tahap 2.	TW IV				

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
					RENCANA AKSI YANG SUDAH SELESAI**	BELUM*** RENCANA AKSI YANG BELUM	TIMELINE	
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	1. Hasil patroli siber masih kesulitan dalam mencari alamat sarana, karena sarana menerapkan sistem COD melalui kurir. 2. Pemilik sarana tidak mau memberikan informasi terkait asal pembelian produk, sehingga petugas kesulitan untuk menindaklanjuti sumber asal produk.	1. Memaksimalkan kegiatan Patroli Siber, Profilling dan Kerawanan Kejahatan di TW IV 2. Mulai menyusun Laporan Analisis Kejahatan Farmasi dan Pangan Olahan agar dapat diselesaikan sesuai standar dan dilaporkan tepat waktu pada TW IV yaitu pada bulan Desember 2025	TW IV				
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	Ada beberapa aspek yang tidak bisa memperoleh nilai maksimal (5).	Memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai IPP.	TW IV				
20	Nilai AKIP UPT BPOM	Sudah dilaksanakan pengisian LKE Evaluasi AKIP untuk tahun 2024, tinggal menunggu jadwal desk dengan inspektorat. Untuk unsur-unsur dari perencanaan sampai pelaporan telah diusahakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan.		TW IV				
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Efisiensi anggaran dan relaksasi yang tidak ditau munculnya kapan sehingga mempengaruhi nilai IKPA. Nilai IKPA masih memperhitungkan pagu blokir, sehingga nilai realisasi anggaran masih kecil.		TW IV				
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-		TW IV				
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Pelaporan disiplin, apel, gratifikasi dan benturan kepentingan telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu.		TW IV				
24	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Rokok yang beredar kurang bervariasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, sehingga kemungkinan merk rokok yang di sampling berulang dari bulan-bulan sebelumnya	1. Tetap melaksanakan pengawasan sesuai perencanaan	TW IV				
25	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pelaporan pada bulan Desember		TW IV				
26	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Pelaporan pada bulan Desember		TW IV				

Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Hasil Evaluasi TW III

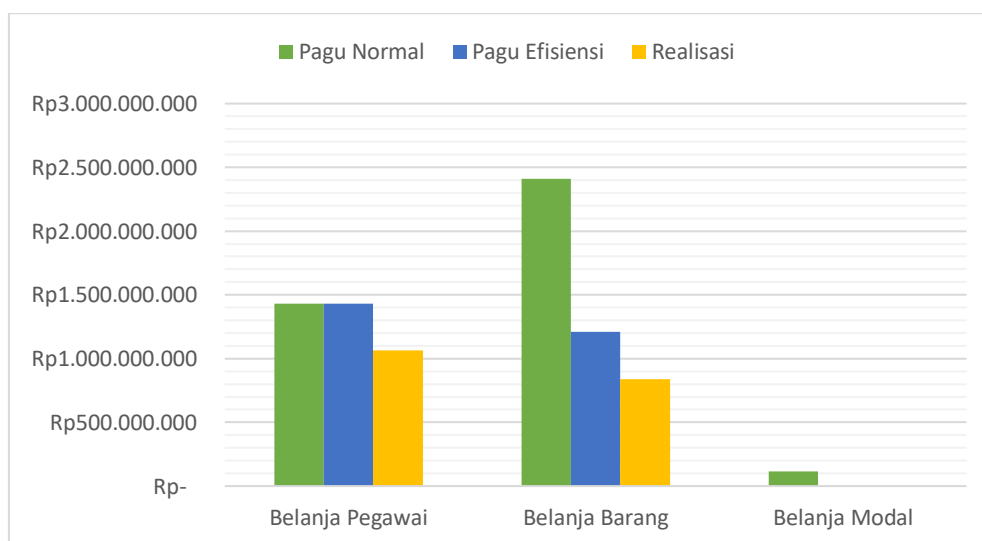
3.3. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.690476/2025 tanggal 02 Desember 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3.927.558.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA. 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke kembali melaksanakan pemblokiran anggaran secara mandiri sebesar Rp949.735.000,- pada belanja barang dan seluruh belanja modal sehingga jumlah anggaran yang tidak dapat dicairkan adalah sebesar Rp1.613.972.000,- atau sebesar 41,09% dari pagu anggaran awal.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke mendapatkan relaksasi pemanfaatan blokir anggaran sebesar Rp293.546.000,- sehingga total blokir anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.320.426.000,- dengan rincian blokir pada belanja modal sebesar Rp116.000.000,- dan belanja barang sebesar Rp1.204.426.000,-

Sesuai dengan surat Sekretaris Utama No. KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025, dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN TA 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp30.437.000,- sehingga pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke meningkat menjadi Rp3.957.995.000,-

Loka POM di Kabupaten Merauke telah menggunakan anggaran sebesar Rp1.898.455.736,- atau sebesar 47,97% dari jumlah pagu anggaran termasuk blokir mandiri. Apabila dikurangi dengan pagu anggaran yang diblokir untuk efisiensi anggaran maka Loka POM di Kabupaten Merauke telah merealisasikan 71,97% anggaran sampai dengan 30 September 2025.



Gambar 3. 1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Secara rinci, realisasi anggaran dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	KODE RO	URAIAN	TARGET	VOLUME		ANGGARAN (Rp)		
				REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	64,28%	81.460.000	2.667.500	3,27%
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	11	9	63,63%	81.316.000	4.500.000	5,53%
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	100	105,26%	75.857.000	23.769.700	31,33%
4	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	121.000.000	0	0
5	3165.BMB.001	Layanan informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	17	11	64,70%	28.650.000	16.874.646	58,89%
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7	0	0	51.000.000	0	0
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	0	65.000.000	0	0
8	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	94.556.000	76.582.803	80,99%
9	3165.QCD.U58	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Merauke	1	0	0	197.379.000	85.761.880	43,45%
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	2	100%	104.802.000	15.512.000	14,80%
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	1	100%	243.839.000	74.912.000	30,72%
12	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	126.798.000	21.203.000	16,72%

NO.	KODE RO	URAIAN	TARGET	VOLUME		PAGU	ANGGARAN (Rp)	
				REALISASI	CAPAIAN		REALISASI	CAPAIAN
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	3	100%	21.614.000	3.802.500	17,59%
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT	50	42	84%	32.900.000	19.969.700	60,69%
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT	78	67	85,89%	39.300.000	33.030.166	84,04%
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	14	11	78,57%	14.206.000	1.650.000	11,61%
17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	117	84	71,79%	118.483.000	91.048.070	76,84%
18	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	0	8.000.000	2.578.500	32,23%
19	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0	2.421.398.000	1.424.593.330	58,83

Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Triwulan III 2025

Realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	299.455.000	222.280.739	74,22%
2	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	579.946.000	152.271.346	26,25%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	21.614.000	3.802.500	17,59%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	197.379.000	85.761.880	43,45%
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	81.460.000	2.667.500	3,27%
6	Layanan publik UPT yang Prima	81.316.000	4.500.000	5,53%
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	2.696.835.000	1.427.171.830	52,92%

Tabel 3. 36 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

3.3.1. Perhitungan Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. Di level UPT, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi dihitung dengan range berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 3. 37 Range Tingkat Efisiensi

Perhitungan efisiensi kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan III 2025 sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37.335.000	31.378.658	84,04%	90	97,55	108,39%	1,29	0,29	Efisien
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.515.000	6.989.395	60,69%	85	100	117,65%	1,93	0,93	Efisien
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	4.935.000	2.995.455	60,69%	100	0	0%	0	-1	Tidak efisien
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.515.000	6.989.395	60,69%	88	95	107,95%	1,77	0,77	Efisien
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	4.935.000	2.995.455	60,69%	0	0	0%	0	-1	Tidak efisien
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	1.965.000	1.651.508	84,04%	85	100	117,65%	1,39	0,39	Efisien
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	23.696.600	18.209.614	76,84%	0	0	0%	0	-1	Tidak efisien
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	3.551.500	412.500	11,61%	91	75	82,42%	7,09	6,09	Tidak efisien

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
	Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder									
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.551.500	412.500	11,61%	91	100	109,89%	9,46	8,46	Tidak efisien
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3.551.500	412.500	11,61%	91	100	109,89%	9,46	8,46	Tidak efisien
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	47.393.200	36.419.228	76,84%	95,75	100	104,44%	1,35	0,35	Efisien
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	47.393.200	36.419.228	76,84%	91	100	109,89%	1,43	0,43	Efisien
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3.551.500	412.500	11,61%	92,40	99,55	107,74%	9,27	8,27	Tidak efisien
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	94.556.000	76.582.803	80,99%	10,67	11,18	104,78%	1,29	0,29	Efisien

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Capaian SK 1		299.445.000	222.280.739	74,23%			84,33%	1,13	0,13	Efisien
Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing Wilayah Kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.507.000	40.644.346	38,89%	86,48	86,71	100,27%	2,57	1,57	Tidak efisien
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	104.802.000	15.512.000	14,80%	100	100	100%	6,75	5,75	Tidak efisien
	Jumlah desa pangan aman	243.839.000	74.912.000	30,72%	100	100	100%	3,25	2,25	Tidak efisien
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	126.798.000	21.203.000	16,72%	100	100	100%	5,98	4,98	Tidak efisien
Nilai Capaian SK 2		579.946.000	152.271.346	26,25%			100,06%	3,81	2,81	Tidak efisien
Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	21.614.000	3.802.500	17,59%	65	91	140%	7,95	6,95	Tidak efisien
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	197.379.000	85.761.880	43,45%	55	15	27,27%	0,62	-0,38	Tidak efisien

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	IE	TE	TINGKAT EFISIENSI
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	81.460.000	2.667.500	3,27%	50	50	100%	30,58	29,58	Tidak efisien
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	81.316.000	4.500.000	5,53%	0	0	0	0	-1	Tidak efisien
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	674.208.750	356.792.958	52,92%	0	0	0	0	-1	Tidak efisien
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	674.208.750	356.792.958	52,92%	0	0	0	0	-1	Tidak efisien
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	674.208.750	356.792.958	52,92%	0	0	0	0	-1	Tidak efisien
	Persentase implelementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	674.208.750	356.792.958	52,92%	75	75	100%	1,88	0,88	Efisien
Nilai Capaian SK 7		2.696.835.000	1.427.171.832	52,92%			25%	0,47	-0,53	Tidak efisien

Tabel 3. 38 Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan 19 (sembilan belas) rincian output untuk mencapai target pada 26 (dua puluh enam) indikator kinerja dan 7 sasaran kegiatan. Dari perhitungan tingkat efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan akhir periode triwulan III, 8 indikator kinerja dan 1 sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori efisien. Penjelasan tingkat efisiensi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 14 indikator kinerja yang jika dirata-ratakan tingkat efisiensi untuk sasaran kegiatan ini adalah 0,13 yang termasuk ke dalam kategori efisien.
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori “tidak efisien”.
3. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu
Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan tingkat efisiensi termasuk ke dalam kategori “tidak efisien”.
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT yang tingkat efisiensinya termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena sampai dengan akhir triwulan III realisasi kinerja dari indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di wilayah kerja UPT
Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar yang capaian kinerjanya telah 100% namun termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena capaian realisasi anggaran tidak sama dengan besaran capaian kinerja.
6. Layanan Publik UPT yang Prima
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 1 indikator yaitu indeks pelayanan publik UPT yang penilaiannya dilakukan secara tahunan sehingga nilai akan diketahui di TW IV. Sasaran kegiatan ini termasuk ke dalam kategori “tidak efisien”.
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal
Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 indikator kinerja yang 3 diantaranya dilakukan penilaian tahunan sehingga nilai akan diperoleh di TW IV. Sedangkan 1 indikator lain yaitu persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT memperoleh capaian kinerja 100% pada triwulan II. Sasaran kegiatan ini termasuk ke dalam kategori “tidak efisien” karena belum ada realisasi kinerja yang dapat dihitung mengingat nilai dari 3 indikator akan diketahui di TW IV 2025.

3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang berdampak pada penyesuaian dan perbaikan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Informasi kinerja pada laporan kinerja interim ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja di periode berikutnya. Dengan adanya informasi berupa kendala dan tindak lanjut dalam pencapaian kinerja triwulan III dapat dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti kendala yang ditemukan agar tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai target kinerja sesuai yang diharapkan.
2. Informasi kinerja yang termuat dalam laporan kinerja interim dapat membantu dalam penyusunan perencanaan kinerja untuk periode berikutnya sebagai bahan masukan dan dasar penentuan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target kinerja.
3. Laporan kinerja interim merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran oleh Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai pelayan publik unit pelaksana teknis BPOM di daerah Papua Selatan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap capaian setiap indikator dan sasaran kegiatan, nilai kinerja organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Merauke pada triwulan III tahun 2025 adalah 100,15% dengan predikat istimewa.
2. Dari perbandingan capaian kinerja triwulan III dengan target tahunan, 13 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori tercapai/melampaui, 2 indikator kinerja kegiatan termasuk dalam kategori akan tercapai, dan 3 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras.
3. Dari hasil perhitungan capaian tingkat efisiensi, 6 sasaran kegiatan pada triwulan III termasuk ke dalam kategori tidak efisien karena beberapa indikator belum memiliki realisasi anggaran sedangkan 1 indikator termasuk ke dalam kategori efisien.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja periode triwulan III tahun 2025, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke untuk periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan.
3. Berkoordinasi aktif dengan unit pengampu di internal BPOM serta lintas sektor di eksternal agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

NOMOR HK.02.02.30C.10.24.41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE

NOMOR HK.02.02.30C.10.24.41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi pengawasan lintas sektor hasil oleh	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,01
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	84,99
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE



MINARTO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINARTO

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Merauke, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke

MINARTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.2 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.48 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	74.29 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,927,558,000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,498,160,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,429,398,000

Merauke, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Merauke



MINARTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

